

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi yang berjalan saat ini mengandung banyak konsekuensi yang harus dijalankan oleh suatu Negara khususnya dalam bidang perekonomian. Persaingan global yang terwujud melalui pasar bebas juga telah mendorong negara-negara ASEAN untuk membentuk sebuah integritas ekonomi yang dinamakan *Asean Economic Community (AEC)*. Berdasarkan konsisi tersebut, maka para pelaku usaha di Indonesia harus segera bersiap dan meningkatkan kualitas diri, termasuk kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang perlu mengetahui seluk beluk dan mempelajari kondisi pasar negara ASEAN (Sasongko, 2016).

Ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia menjadi poin penting yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan *AEC* karena saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menghadapi realitas *AEC* yang berdiri di atas pilar pasar tunggal dan basis produksi regional. Seiring dengan pilar *AEC* tersebut, maka sangatlah jelas bahwa UMKM yang ada di Indonesia akan menghadapi persaingan yang cukup ketat dari negara lain, sehingga mau tidak mau UMKM harus berbenah dan saling menguatkan untuk dapat menyesuaikan perubahan kebijakan global.

Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Salah satu kelebihan dari UMKM adalah mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. UMKM juga lebih tangguh dalam menghadapi krisis (Ardiana dkk, 2010).

Mengingat pentingnya UMKM bagi kelangsungan perekonomian negara, maka Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis berkaitan dengan masalah UMKM mulai dari perlindungan hukum, model pendanaan sampai pada aspek sarana prasarana (UU. No 20 Tahun 2008). Terkait dengan masalah pembiayaan UMKM, Pemerintah juga menerbitkan Program Kredit Usaha Rakyat (Kepmen Perekonomian No.170 Tahun 2015).

Langkah yang diambil oleh pemerintah merupakan tindakan yang sangat tepat karena memiliki substansi untuk menguatkan UMKM dari sisi kelemahan-kelemahan yang selama ini dimiliki. Salah satu kelemahan Usaha berskala kecil adalah faktor Modal atau anggaran. Aloysius, dkk (2003) menjelaskan bahwa biasanya UMKM memiliki anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar dalam menjalankan usahanya. Para usahawan UKM harus mengatur anggaran seefisien mungkin demi kelancaran operasional usaha. Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa mengakibatkan pailit.

Meskipun banyak regulasi sebagaimana yang diterbitkan oleh pemerintah, kenyataan di lapangan masih banyak ditemui kendala diantaranya adalah banyaknya UMKM yang tidak memenuhi persyaratan bank sehingga tidak dapat menikmati kebijakan KUR. Kedua adalah bahwa kurangnya pengetahuan, pemahaman terhadap pembukuan akuntansi seringkali menyebabkan UMKM gulung tikar karena tidak memiliki kontrol terhadap keuangannya.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memiliki Program Ekonomi bergulir lainnya yang ada diluar penunjukkan penyalur dana KUR salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMPd) sebagai salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan salah satunya dengan pengelolaan dana pinjaman bergulir.

Seiring dengan perkembangan regulasi khususnya *pasca* diterbitkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka PNPMPd berubah menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dikhususkan sebagai lembaga akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil. Oleh karena itu banyak UMKM yang menggunakan jasa pembiayaan dari program ini melalui pembentukan kelompok.

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun merupakan salah satu wilayah administratif yang juga menjadi subjek serta objek dari pelaksanaan program DAPM sebagai lanjutan dari program PNPMPd. Data keberadaan UMKM di

Kecamatan Geger sampai pada tahun 2017 adalah mencapai 4.203 UMKM. Dari data tersebut yang masuk di dalam perguliran DAPM hanya sebanyak 114 pemanfaat. Meskipun demikian belum diketahui apakah jumlah pemanfaat tersebut menggambarkan jumlah pemilik UMKM secara total (Dinas Indakop Dan UKM Kabupaten Madiun, 2017).

Pemberian bantuan melalui pinjaman perguliran ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan pendapatan UMKM yang bersangkutan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional atau sampai kepada ekonomi makro. Aspek pendanaan juga bukan satu-satunya kelemahan dari UMKM. Faktor pengelolaan keuangan melalui pembukuan sangat penting dan memiliki peranan vital bagi UMKM dalam melakukan kontrol keuangannya sehingga pelatihan akuntansi sangat berperan dalam meningkatkan kapasitas tersebut (Abidin, 2015).

Modal usaha yang dikelola dengan baik diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan pendapatan UMKM. Selain memberikan pinjaman bergulir, program PNPMPd yang dilanjutkan menjadi DAPM juga memberikan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat khususnya bagi UMKM secara berkala. Pinjaman perguliran yang dikeluarkan oleh DAPM Kabupaten Madiun sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai angka Rp. 9.772.050.000. Untuk Kecamatan Geger sampai dengan tahun 2016 mencapai angka 361.500.000 (DAPM. Kabupaten. Madiun, 2016).

Modal usaha dan juga pelatihan akuntansi yang baik tentu dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Modal usaha yang besar dan didapatkan dengan tanpa beban yang berat tentu UMKM dapat meningkatkan produktifitasnya sehingga akan berimbang pada peningkatan pendapatan. Meskipun demikian jika modal itu penggunaannya lepas dari kontrol keuangan juga kemungkinan justru akan menambah beban dari UMKM yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka pelatihan akuntansi dan juga peningkatan kapasitas masyarakat yang lainnya sangat diperlukan oleh UMKM.

Ekonomi bergulir di dalam program DAPM disalurkan melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh UMKM sebagai peminjam dan juga oleh pengelola yaitu mulai dari tahap pengajuan pinjaman sampai kepada tahap pembinaan. Setiap tahap tersebut jika dijalankan dengan baik maka akan memberikan pemahaman kedua belah pihak. Bagi UMKM akan mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mengelola usaha dan bagaimana cara manajemen keuangannya. Bagi pengelola, setiap interaksi dalam proses tersebut akan memberikan informasi mengenai kondisi UMKM yang bersangkutan dari semua aspek yang ada (Adriawan, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Sukanto, dkk (2015) menyimpulkan bahwa pemanfaat program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri sangat terbantu dalam pengembangan usaha yang telah dikelola serta cukup efektif dalam membantu modal usaha. Terkait dengan pelatihan, Hedriani, dkk (2015) menyimpulkan bahwa pelatihan dan pembinaan yang diberikan tiap

tahunnya yaitu, manajemen pengelolaan kredit, pelatihan pelatihan akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari mitra binaan serta diberikan motivasi dapat meningkatkan pendapatan UMKM.

Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada masalah kuantitas modal yang diberikan oleh program pinjaman bergulir sedangkan untuk pelatihan berorientasi pada materi yang mengarah pada pengelolaan UMKM. Penilaian berdasarkan kuantitas tidak menunjukkan kualitas pengelolaan pinjaman bergulir yang dilakukan oleh pengelola dalam rangka mendorong keberhasilan UMKM. Penting dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai fungsi-fungsi program ekonomi bergulir seperti DAPM ini karena di dalamnya juga terdapat tahapan-tahapan salah satunya adalah pembinaan UMKM. Keberadaan Program PNPMPd sampai berlanjut pada DAPM perlu di *fitback* terhadap peningkatan pendapatan UMKM sebagai salah satu ukuran keberhasilan program.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Pengaruh Pinjaman Bergulir dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pemanfaat Program DAPM Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka di dalam penenilitian ini ditetapkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pinjaman bergulir terhadap pendapatan UMKM pemanfaat Program DAPM di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?.
2. Bagaimana pengaruh pelatihan akuntansi terhadap pendapatan UMKM pemanfaat Program DAPM di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?.
3. Bagaimana pengaruh pinjaman bergulir dan pelatihan akuntansi terhadap pendapatan UMKM pemanfaat Program DAPM di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka di dalam penenilaian ini ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pinjaman bergulir terhadap pendapatan UMKM pemanfaat Program DAPM di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Mengetahui pengaruh pelatihan akuntansi terhadap pendapatan UMKM pemanfaat Program DAPM di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
3. Mengetahui pengaruh pinjaman bergulir dan pelatihan akuntansi terhadap pendapatan UMKM pemanfaat Program DAPM di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Universitas khususnya mengenai kajian-kajian di bidang ekonomi bergulir yang berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UMKM).

2. Bagi PNPMPd (DAPM)

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi program dalam melakukan pengelolaan keuangan dan juga dalam rangka melakukan pembinaan UMKM yang menjadi pemanfaat pinjaman bergulir melalui perencanaan usaha, penganggaran dan juga kontrol keuangan yang dapat meningkatkan pendapatan UMKM sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan..

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang di teliti terutama dalam hal ekonomi bergulir dan dinamika UMKM baik pada wilayah internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pembiayaan dan kemampuan UMKM dalam pengelolaan keuangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat lanjutan, menyempurnakan.